

MEDIA BARU, RUANG PUBLIK BARU, DAN TRANSFORMASI KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA

Salvatore Simarmata¹

ABSTRACT

This article tries to unveil the transformative power of the new media platforms that reshape a new pattern of political communication in our democracy. Furthermore, the characteristics of new media have contributed significantly to the renaissance of an enabling public sphere. The structure of new media transforms the restricted and deep-rooted top-down pattern of political communication into one that is decentralized and bottom-up today. There are, at least, five forms of transformation in the pattern of political communication as the result of utilizing various features of the new media technology, namely e-government, political campaign, citizen's aspirations channel, and decentralized political education. Some trends of the application in the context of general election's micro-political communication (citizen-to-citizen) are discussed succinctly, such as Vote Cerdas BDG, Orang Baik, Bersih2014, Check Your Candidates, Mata Massa, Rumah Pemilu, and Jari Ungu.

Keywords : new media, political communication, public sphere, transformation

Interact:

Vol. 3, No. 2, Hal. 18 – 36
November, 2014
Prodi Ilmu Komunikasi,
Unika Atma Jaya Jakarta

¹ Penulis adalah dosen di School of Communication Unika Atma Jaya Jakarta, dan dapat dihubungi di salvatore.simarmata@atmajaya.ac.id

PENDAHULUAN

Pemilu legislatif dan pemilu Presiden 2014 merupakan momen strategis untuk meletakkan arah konsolidasi demokrasi Indonesia yang substantif dan berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Transisi politik dari otoritarianisme ke era reformasi di masa lalu memberikan sejumlah pelajaran penting dalam penguatan demokrasi ini. Pelajaran tersebut tidak lepas dari melemahnya institusionalisasi prinsip-prinsip demokrasi di lembaga-lembaga politik. Sebaliknya korupsi makin melumpuhkan fungsi-fungsi pengawasan politik, dan bahkan partai politik menjadi mesin pencetak koruptor. Maka corak politik yang buram ini perlu dihapuskan hingga ke akar-akarnya.

Ketika pemilu tiba, sejumlah harapan mulai tampak. Salah satu harapan itu adalah munculnya gerakan swadaya masyarakat untuk mengkritisi politisi kotor dan menyodorkan politisi bersih serta kompeten dengan memobilisasi sejumlah platform media baru di internet. Gerakan ini merupakan fenomena baru dalam demokrasi elektoral sejak reformasi.

Selama ini relasi masyarakat dan elit politik sangat renggang. Komunikasi yang cenderung satu arah dan *top-down* membuat para elit politik leluasa untuk melakukan penyimpangan tanpa ada pengawasan yang ketat. Komunikasi politik yang cenderung mengandalkan media konvensional seperti televisi dan surat kabar mengekang kemampuan kritis warga untuk secara langsung melakukan kontrol secara terbuka dengan para elit politik tersebut. Masyarakat juga tidak terlalu leluasa untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat karena media komunikasi cenderung mengakomodir aspek-aspek yang mencolok sesuai prinsip-prinsip nilai berita.

Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk mengobservasi bentuk-bentuk penggunaan media baru dalam politik di Indonesia dalam mentransformasi pola komunikasi politik antara struktur dan elit politik dengan masyarakat. Transformasi merupakan proses yang secara signifikan memberi perubahan

pada pola dan struktur komunikasi politik dalam konteks demokrasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif merupakan ukuran karakter signifikansi dari topik, bobot diskusi, fakta, relevansi dan transparansi, sementara secara kuantitas menyangkut intensitas atau jumlah praktek komunikasi yang terjadi serta partisipasi masyarakat yang tinggi.

TINJAUAN TEORITIS

Mengapa Media Baru

Media konvensional telah lama dikritisi karena kecenderungan bias pemberitaannya yang bertolak-belakang dengan peran media sebagai institusi sosial. Alasan lain adalah kentalnya orientasi kepentingan ekonomi dan keterkungkungan pada prinsip objektivitas dalam memberitakan isu-isu politik. Di negara-negara demokratis, tren ini terus berulang. Deregulasi sebagai konsekuensi dari liberalisasi ekonomi dan politik, makin menegaskan kecenderungan media untuk mengabdikan pada kepentingan kapital. Sebaliknya, di negara-negara otoriter/totaliter, media mengalami represi dan sensor yang ketat. Media menjadi bagian dari alat propaganda penguasa otoriter.

Sementara itu, demokrasi membutuhkan warga negara yang *well-informed*. Warga negara yang punya kesadaran politik merupakan kekuatan demokrasi, karena dalam demokrasi warga negaralah yang menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin. Pilihan politik warga negara menentukan kualitas kepemimpinan. Pilihan politik yang rasional dan kritis hanya dapat terbentuk jika tersedia sumber informasi yang substantif dan berkaitan dengan kepentingan mereka. Sehingga, peran media dalam menyediakan informasi yang berkualitas, substantif, terkait kepentingan rakyat, dan memberi evaluasi atas jalannya pemerintahan merupakan modal mendasar untuk membentuk sikap politik yang kritis.

Selanjutnya, media dalam demokrasi juga berperan sebagai ruang publik. Ruang publik adalah wahana di mana warga negara dapat saling mengutarakan pendapat untuk

mencapai kesepakatan bersama mengenai kepentingan mereka. Lewat ruang publik yang demokratis, akan terbentuk opini publik sebagai modal politik dalam mengarahkan jalannya pemerintahan. Ruang publik yang ideal hendaknya memberi kesempatan yang sama bagi tiap warga negara untuk terlibat dalam deliberasi publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Namun, media konvensional khususnya televisi sudah jauh dari cita-cita ruang publik ini. Televisi lebih condong memperjuangkan kepentingan kalangan elit. Orang-orang yang terlibat dalam diskusi politik hanyalah para elit penguasa, pejabat publik, dan para petinggi partai politik. Deliberasi di ruang publik pun menjadi sangat elitis dan jauh dari kesulitan hidup sehari-hari masyarakat, sebab lebih cenderung sebagai perebutan kekuasaan antarelit. Untuk keseluruhan fenomena ini Habermas (1989: 142) mengatakan bahwa ruang publik, sebagaimana masyarakat itu sendiri, telah mengalami refeudalisasi.

Krisis ruang publik dan komunikasi politik yang ditampilkan media konvensional, membuat teknologi media baru makin menampilkan karakter transformatifnya. Artinya media baru menjadi jawaban tepat untuk merevitalisasi kembali ruang publik dan komunikasi politik yang sudah terkolonialisasi oleh kepentingan modal.

Peran internet sebagai media baru sudah ditunjukkan lewat peran mailing-list group "*apakabar*" yang dimoderatori oleh John A. MacDougall² dalam "perjuangan" menumbangkan Orde Baru tahun 1997. Fakta lain yang tak lebih optimistik adalah

kesuksesan Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk memenangkan pemilihan presiden terakhir berkat mobilisasi berbagai bentuk media baru untuk menggalang dana, dukungan, sukarelawan, dan simpatisan. Selain itu, dua kasus terakhir di Indonesia yang menggalang kekuatan *netizen* mendukung Prita Mulyasari dan wakil ketua KPK, Slamet Bibit Riyanto dan Chandra Hamzah perlu untuk dibahas.

Media dan Demokrasi

Demokrasi dan media memiliki hubungan yang resiprokal. Di satu sisi demokrasi membutuhkan media sebagai alat komunikasi politik, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, di sisi lain media hanya dapat berfungsi bagi kepentingan masyarakat luas dalam sistem politik yang demokratis. Sistem politik yang demokratis dimaksudkan untuk membedakannya dari sistem otoritarian atau totalitarian.

Hubungan saling membutuhkan antara media dan demokrasi dapat ditelaah dari dua sudut pandang secara simultan, yaitu: sudut pandang makro dan sudut pandang mikro (Mughan & Gunther, 2000). Sudut pandang makro melihat struktur dalam sistem media dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi politik. Pada umumnya, karakter sistemik yang paling berpengaruh adalah pola peraturan pemerintah, pola kepemilikan media, pola program acara, struktur audiens, dan karakter penonton (*viewership*). Sementara pendekatan mikro lebih fokus pada investigasi efek komunikasi politik pada tingkat individual.

Dengan demikian, sukses-tidaknya media dalam membangun demokrasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri. Sekadar contoh, pada tingkat mikro, walaupun media sudah berusaha untuk menfokuskan pemberitaan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara kritis, namun jika masyarakat tidak memiliki cukup kapabilitas untuk menerima informasi tersebut secara rasional, maka berita tersebut menjadi tidak banyak bermakna. Faktor yang mempengaruhi kapabilitas individual ini mencakup ketertarikan pada isu publik, kemampuan

² John A. MacDougall adalah seorang peneliti dan asistent professor lulusan PhD dari Universitas Harvard di bidang Sociology. Dia merupakan pakar yang menfokuskan penelitiannya di Asia termasuk secara khusus tentang Indonesia. Database mailing list "*apakabar*" disimpan di perpustakaan Universitas Ohio (<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/search/search.html>), serta data dan hasil karya lengkap MacDougall dapat dilihat di: <http://www.indopubs.com/biodata.html>.

literasi, punya akses terhadap media, dan lain-lain.

Idealnya, dalam demokrasi setiap warga negara sudah memiliki kesadaran politik yang cukup. Dengan kata lain dia tidak hanya mampu memahami isu-isu politik, melainkan sadar dan terdorong untuk mencari informasi yang dia gunakan sebagai pedoman untuk menentukan pilihan politiknya. Faktor-faktor inilah yang ada pada tingkat mikro.

Pada tingkat makro, media awalnya ditentukan oleh sistem politik. Sistem politik yang otoriter akan membentuk corak media yang terkungkung. Sistem politik yang demokratis akan menghasilkan media yang liberal (Hackten, 1981; Siebert, Peterson, & Schramm, 1963). Namun realitas politik di dunia saat ini, khususnya setelah perang dunia ke dua, media lebih tepat ditempatkan dalam konteks politik demokrasi. Walaupun harus diakui bahwa keberadaan media dalam konteks politik demokrasi, tidaklah serta-merta akan menjadi tulang-punggung proses menuju demokrasi yang substantif.

Sejalan dengan itu, pada tingkat makro terdapat dua model pengaturan media, khususnya media penyiaran, yaitu: *public service model*³ dan *commercial model*⁴, seperti yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Perbedaan yang paling utama antara keduanya adalah: *public service broadcasting* lebih fokus pada berita dan isu-isu publik, features, dokumenter, art, musik, permainan, sementara *commercial*

broadcasting lebih menekankan hiburan (Mughan & Gunther, 2000: 10). Sehingga kedua model ini akan memberikan kadar kontribusi positif yang berbeda pada demokrasi. Pada intinya, sistem penyiaran publik lebih menyediakan kesempatan bagi tumbuhnya demokratisasi lewat fungsi media.

Sementara media dalam sistem otoritarian sudah pasti tidak akan berpihak pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena media telah diambil alih oleh politisi sebagai alat propaganda. Sementara itu, dalam demokrasi media juga belum tentu berpihak pada kepentingan masyarakat: keberpihakan itu misalnya dapat ditunjukkan lewat orientasi pemberitaannya. Ketidakberpihakan media pada demokrasi ini disebabkan oleh media telah banyak mengabdikan pada kepentingan bisnis.

Pada akhirnya media konvensional (khususnya televisi) yang awalnya diharapkan dapat berperan sebagai ujung tombak sarana komunikasi politik dan ruang, malah tergerus oleh kepentingan pemilik modal. Media konvensional pada hakekatnya merupakan lembaga bisnis. Walaupun eksistensinya pada awalnya ditentukan oleh faktor politik dan teknologi, namun dalam keberlangsungan hidupnya lebih ditentukan oleh faktor ekonomi. Di tengah ironi media dalam demokrasi inilah muncul kekuatan baru berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi media baru dalam konteks ini menjadi variabel independen untuk mengubah corak komunikasi politik dalam demokrasi. Media baru, khususnya internet dan *world wide web*, merupakan hasil revolusi teknologi komunikasi dan informasi. Media baru ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan politik. Walaupun masih baru, tetapi harapan besar ditujukan pada media ini untuk berbagai segi kehidupan karena karakter memungkinkan (*enabling*) yang dimilikinya. Serta secara struktural, media baru sangat jauh berbeda dengan media konvensional baik dalam hal isi,

³ Contoh yang paling baik untuk kategori ini adalah BBC di Inggris. Sejak kelahiran BBC tahun 1920-an, pemerintahan Inggris telah memutuskan bahwa media penyiaran merupakan bagian dari fasilitas publik (*public utility*) yang harus dijaga oleh negara guna mewujudkan kepentingan umum. BBC diberi monopoli penyiaran dan independensi politik dan finansial dari pemerintah, dengan cara memberlakukan pemberian izin siaran tiap tahun kepada semua penyiaran radio dan televisi untuk menopang BBC.

⁴ Model ini terdapat di Amerika Serikat. Sesuai dengan filosofi dasar negara dalam liberalisme dan etos campur-tangan minimal negara, pemerintah mendukung sistem media penyiaran yang dikuasai oleh swasta, secara regional, dan berorientasi pada profit.

fungsi, institusi, maupun akses publik (Tabel 1).

Kekuatan media baru ini diyakini akan menguatkan demokrasi. Asumsi ini didasarkan pada kesesuaian antara karakter media baru dan karakter demokrasi. Demokrasi mencerminkan kesetaraan, pengakuan atas perbedaan, kebebasan, partisipasi, dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.. Dalam media baru nilai-nilai demokrasi tersebut terealisasi. Media baru membuka ruang yang bebas (bahkan cenderung tak terbatas), ditopang oleh prinsip kesetaraan (*equality*), dan kebebasan (*freedom*), serta setiap orang punya peran sebagai pencipta (*produser*) yang independen. Kekuatan lain media baru terletak pada kemampuan partisipatifnya. Partisipasi sesungguhnya adalah prinsip dasar demokrasi. Benjamin Barber (1990: 8) mengatakan bahwa partisipasi, pada akhirnya, memperluas (*enhances*) kekuatan masyarakat, dan mewujudkannya dalam sebuah kekuatan moral, sesuatu yang dalam sistem politik non-partisipatif tidak terjadi.

Ruang Publik dan Deliberasi Politik

Demokrasi menjadi sistem politik paling populer di era modern ini. Bentuk demokrasi yang diterapkan merupakan demokrasi perwakilan, sebab model inilah yang paling ideal dan efektif untuk saat ini dibanding model lainnya. David Held (1995: 5) menjelaskan bahwa, secara umum ada

tiga tipe demokrasi, yaitu: demokrasi langsung (*direct democracy*), demokrasi perwakilan (*liberal/ representative democracy*), dan demokrasi satu partai.

Demokrasi langsung adalah sebuah sistem pengambilan keputusan tentang kepentingan publik di mana warga negara terlibat langsung. Negara kota, disebut juga *polis* di Athena, dipimpin oleh gubernur warga negara (*citizen-governors*) di mana tercermin bahwa hampir tidak ada batasan antara negara dan masyarakat. Dengan kata lain, pada zaman Athena kuno rakyat (*citizen*) pada saat yang sama menjadi bagian dari otoritas politik yang berfungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan. Masyarakat (*demos*) terlibat dalam bidang fungsi legislatif dan yudikatif, sebab konsep masyarakat Athena tentang kewarganegaraan (*citizenship*) menuntut keterlibatan aktif mereka dalam fungsi tersebut yaitu berpartisipasi secara langsung dalam hal urusan negara. Model demokrasi ini tentu tidak terlalu membutuhkan mekanisme yang kompleks dalam mencapai keputusan-keputusan penting terkait dengan jalannya pemerintahan.

Selain kesepakatan masih mudah untuk dicapai, kompleksitas kepentingan kehidupan sebagai negara pun masih rendah.

Tabel 1: Karakteristik Media Konvensional vs Media Baru
(Diolah dari Sparks, 2001; Pavlik, 1996)

Karakter		Media Konvensional	Media Baru
1	Isi	Cenderung terbatas, adanya sensor, pembatasan oleh <i>space</i> , unsur lokalitas	Tidak terbatas, transparan, prinsip global, bebas, publikasi isi cepat
2	Orientasi fungsi	Kelas elit, mengabaikan universalitas publikasi	Semua kalangan, akses universal
3	Institusi	Terpusat, dikendalikan oleh pemilik, adanya konsentrasi kepemilikan, membutuhkan modal besar	Terdesentralisasi, fleksibel, anonimitas, pengguna sebagai pemilik, hanya untuk modal akses
4	Akses publik	Rendah, satu arah	Sangat luas, multi-arah, interaktif, kebebasan, kesetaraan (<i>equality</i>)

Demokrasi liberal adalah suatu sistem pemerintahan yang dibentuk dengan memilih para pejabat negara yang bertugas untuk mewakili kepentingan dan pandangan-pandangan warga negara dari batas wilayah tertentu dengan berpatokan pada penegakan hukum yang berlaku. Demokrasi sekarang ini sulit menerapkan model demokrasi klasik yang bersifat langsung. Demokrasi modern lebih mengadopsi demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, walaupun di beberapa negara masih terdapat demokrasi dengan tipe satu partai tunggal seperti di negara-negara komunis-sosialis. Demokrasi Perwakilan menjadi pusat perhatian dalam pembahasan ini.

Demokrasi perwakilan yang populer itu tidak luput dari pembusukan politik. Liberalisasi politik menyebabkan konsep perwujudan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berubah menjadi ajang kompetisi antarelit semata. Konsep “demokrasi” yang mulia dialihkan menjadi sarana untuk melanggengkan kekuasaan dan menimbun materi oleh para penguasa. Pada saat yang sama, masyarakat menjadi diabaikan keberadaannya. Barber (1990: 147) menjelaskan bahwa:

“Representative democracy suffers, then, both from its reliance on the representative principle and from its vulnerability to seduction by an illicit—from the illusion that metaphysics can establish [...] By subordinating the will and judgment of citizens to abstract norms about which there can be no real consensus, these mode demean citizenship itself and diminish correspondingly the capacity of the people to govern themselves.”

Jalan keluar bagi kebuntuan politik tersebut adalah menegaskan demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif (*participatory democracy*) merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung (*direct democracy*). Van Dijk (2000: 43) menjelaskan bahwa demokrasi partisipatoris mendasarkan kinerjanya pada warga negara (*citizens*)

secara substansial daripada ke organisasi atau lembaga-lembaga negara.

Pusat dari demokrasi partisipatif adalah warga negara. Maka demokrasi deliberatif yang menempatkan partisipasi warga negara sebagai pilar utama dalam sistem politik sangat relevan dengan kehadiran teknologi media baru. Demokrasi deliberatif, menurut Bohman (1996) secara teoritis memiliki empat ciri, yaitu:

1. menekankan keutamaan deliberasi untuk membuat keputusan politik;
2. sifat normatifnya sangat kuat, dalam arti menolak reduksi atas politik pada rasionalitas strategis dan instrumental
3. bersifat proseduralis
4. bersifat universalis

Dalam politik demokrasi deliberatif terdapat kekuatan tindakan komunikatif pada forum publik. Proses deliberasi dalam forum terbuka tersebut adalah sebuah proses di mana warga negara berusaha untuk meyakinkan warga lainnya untuk menerima kebijakan yang diusulkan dengan berlandaskan penggunaan *reason* di hadapan publik (*public use of reason*) dalam proses dialog deliberatif yang *take and give* (Bohman, 1996: 15). Peran ruang publik dalam proses ini menjadi sangat penting. Demokrasi yang dibangun secara diskursif lewat ruang publik tersebut merupakan “rumah” bagi konstestasi berbagai wacana, di mana pada proses komunikasi tersebut harus dipenuhi tiga syarat, yaitu: mampu merangsang pemikiran reflektif, non-koersif, dan mampu menghubungkan pengalaman individual/kelompok dengan sebuah prinsip yang lebih umum (Dryzek, 2003: 9-10).

Sejalan dengan itu, Bohman (1996) menyebutkan bahwa proses deliberasi dapat berhasil jika dipenuhi tiga syarat, yaitu:

1. *the non-tyranny condition sets institutional limits to the deliberative process so that no one group consistently maintain an undue power advantage*
2. *a condition of equality must be met; all citizens must have an*

equal access to decision making process

3. *deliberation is “fully democratic” when it is public both in its weak and its strong senses*

Media konvensional, khususnya televisi, sebenarnya memiliki kualitas yang tepat dalam mengembangkan model demokrasi deliberatif ini. Sifat mediumnya yang mampu menghadirkan pesan audio-visual menjadi kekuatan tersendiri ketika ditayangkan secara *live* untuk sebuah acara dialog. Diskusi “interaktif” yang menghadirkan berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, warga masyarakat, akademisi, LSM, dan lain-lain, akan menciptakan kesepahaman yang lebih komprehensif. Tetapi, secara kuantitas dan kualitas, aksesibilitas menjadi rintangan tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi lewat media televisi. Televisi sebagai ruang publik pun menjadi minimalis.

Ruang publik (*public sphere*) merupakan sebuah ruang yang mudah diakses tanpa batas, bebas dari tekanan kekuasaan negara dan ekonomi, di mana warga negara melakukan pembicaraan politik guna mewujudkan suatu kesepahaman bersama terkait dengan kepentingan umum yang lebih luas. Konsep dasar ruang publik ini terungkap dari pemikiran Habermas (1989). Ruang publik merupakan “tempat” untuk berkomunikasi sebagai elemen pembentuk kehidupan sosial (*life-world*) yang bersandar pada rasionalitas komunikatif anggota masyarakat.⁵ Habermas

⁵ Bagi Habermas suatu masyarakat ditopang oleh dua elemen dasar, yaitu sistem (*system*) dan dunia kehidupan (*life-world*). Sistem (seperti: politik, ekonomi) digerakkan oleh rasionalitas instrumental yang berupaya menghadirkan kontrol. Sementara dunia kehidupan ditopang oleh komunikasi, kesepakatan, dan konsensus di mana bahasa menjadi alatnya. Dunia kehidupan disusun oleh tiga elemen yaitu: budaya, masyarakat, dan kepribadian. Kepribadian di sini merupakan kompetensi seseorang untuk berbicara dan bertindak dalam mencapai suatu pemahaman. Kompetensi komunikasi yang diperlukan guna mencapai

mengungkapkan sejumlah definisi tentang ruang publik tersebut sebagai berikut:

The public sphere is: private persons making public use of their reason (Habermas 1989: 27); populated by private people gathered together as a public and articulating the needs of society with the state (Habermas 1989: 176); a realm of our social life in which something approaching public opinion can be formed (Habermas 1974: 49).

Setidaknya terdapat empat “elemen” penting dalam ruang publik, yaitu: hadirnya *private persons*, *use of reason*, *need articulation*, dan *public opinion*. Jadi, debat politik dalam acara televisi (*TV debates*) maupun pada program dialog pada program *current affairs* merupakan upaya untuk merealisasikan elemen-elemen penting tersebut.

Media massa hanyalah salah satu dari bentuk ruang publik modern. “Dunia” di mana opini publik akan terbentuk menurut Habermas (1989), pada awalnya bermula dari perkembangan kelas borjuis pada abad ke-16 dan -17 di Inggris, Jerman, dan Prancis. Ruang publik pada masa itu berupa balai kota, warung kopi, salon, dan pada akhirnya ditemukan *newsletter* dari para penguasa atau pedagang. Isi dari *newsletter* ini adalah seputar harga-harga barang, pajak, serta peraturan pemerintah. Sementara, ruang publik modern awal adalah surat kabar (1700-an), kemudian radio (1920-an), dan televisi (1950-an), serta yang terakhir adalah internet (1970-an). Kini, Internet disebut juga sebagai ruang publik post-modern.

Supaya ruang publik sebagai ruang perbincangan politik (*political talk*) dapat

kesepahaman tersebut didasarkan pada rasionalitas kritis. Oleh sebab itu, *public sphere* sebagai konteks di mana terjadi tindakan komunikasi yang kritis hanya dapat terjadi dalam dunia kehidupan (Baxter, 1987). Namun, dalam masyarakat kapitalis modern, keberadaan sistem acap kali mengekang dunia kehidupan yang ada, sehingga mengancam keberlangsungan komunikasi.

memberi kontribusi pada demokrasi, maka proses deliberasi tersebut harus berbeda dari percakapan biasa. Perbincangan dalam ruang publik harus menggunakan tindakan komunikatif masing-masing individu yang terlibat secara rasional. Habermas menjelaskan perbincangan dalam ruang publik ideal perlu mencerminkan kriteria-kriteria: *comprehensibility*, *truth*, *truthfulness*, dan *rightness* (Habermas, 1984). Sejalan dengan itu Dahlberg (2004) menyatakan enam syarat deliberasi dalam ruang publik ideal, yaitu: *exchange and critique of reasoned moral-practical validity claims*, *reflexivity*, *ideal role taking*, *sincerity*, *discursive inclusion and equality*, *autonomy from state and economic power*.

Kriteria-kriteria tersebutlah yang hendaknya digunakan oleh para politisi dalam mengambil suatu keputusan politik. Dari sisi warga negara, kehadiran internet sebagai ruang publik sangat memungkinkan menerapkan kriteria-kriteria tersebut. Sehingga, internet sebagai ruang publik dapat sungguh-sungguh berkontribusi pada demokrasi lewat penguatan masyarakatnya di tengah-tengah negara.

Struktur Media Baru: Ruang Publik Baru

Internet dan *world wide web* merupakan dua elemen utama yang memungkinkan teknologi media baru tersebut menjadi media komunikasi. Dengan kecanggihan aplikasi teknologi baru itu terbentuklah beberapa format media.

Media baru adalah semua bentuk media yang menggabungkan tiga unsur C, yaitu: *computing and information technology* (IT), *communication network*, dan *convergence (digitalized media and information content* (Flew, 2005: 2). Media baru yang dapat juga disebut *digital media*, memiliki ciri-ciri di mana informasi menjadi mudah dimanipulasi, berjejaring, padat, mudah diperkecil, dan seolah tidak punya pemilik.

Sebagian kalangan menganggap media baru berbeda dengan media sosial. Media sosial merupakan seluruh bentuk media jejaring di internet yang berfungsi

untuk menciptakan jejaring komunitas virtual, seperti Facebook dan Twitter. Pada kesempatan ini media sosial dipandang sebagai bagian dari media baru. Artinya media sosial adalah salah satu bentuk media baru. Dalam konteks politik, media baru yang paling banyak diaplikasikan selain *homepage* atau *website* dan *e-mail* adalah bentuk-bentuk media jejaring tersebut. Media jejaring atau media sosial ini memiliki ciri politis karena dapat menyatukan para pengguna secara virtual layaknya sebuah organisasi dalam kehidupan nyata (riil).

Antony Mayfield (2008) dari organisasi iCrossing menjelaskan bahwa, media sosial lebih tepat dipahami sebagai *a group of new kinds of online media*, yang memiliki karakteristik berikut:

1. **Participation:** *social media encourages contributions and feedback from everyone who is interested. It blurs the line between media and audience.*
2. **Openness:** *most social media services are open to feedback and participation. They encourage voting, comments and the sharing of information. There are rarely any barriers to accessing and making use of content – password-protected content is frowned on.*
3. **Conversation:** *whereas traditional media is about “broadcast” (content transmitted or distributed to an audience) social media is better seen as a two-way conversation.*
4. **Community:** *social media allows communities to form quickly and communicate effectively. Communities share common interests, such as a love of photography, a political issue or a favourite TV show.*
5. **Connectedness:** *Most kinds of social media thrive on their connectedness, making use of links to other sites, resources and people.*

Sejalan dengan itu, setidaknya hingga saat ini media sosial dapat dibedakan ke dalam enam jenis, yaitu: *social networks* (Friendster, MySpace, Facebook, Bebo), *blogs* (blogspot, wordpress, multiply), *wikis* (Wikipedia), *podcasts* (iTunes), *forums* (mailing list, website), *content communities* (flickr, del.icio.us, YouTube), dan *microblogging* seperti *Twitter* (Mayfield, 2008). Keseluruhan bentuk media sosial ini telah digunakan secara simultan, dan saling terhubung.

Struktur media baru yang memberi kontribusi pada ruang publik adalah yang dapat memfasilitasi proses perbincangan politik secara *in-group*. Maka media yang lazim dipakai adalah *social networks*, *blog*, dan *mailing list*. Peter Dahlgren (2005: 153) menyatakan bahwa bentuk ruang publik *virtual* di media baru (*net-based public sphere*), bisa diklasifikasi dalam lima kategori, yaitu: *e-government*, *advocacy/activist domain*, *civic forums*, *parapolitical domain*, dan *journalism domain*. Dengan sifatnya yang virtual, interaktif, konvergen, dan global, maka internet hadir sebagai ruang publik yang lebih luas. Media baru membentuk ruang publik berskala internasional.

Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi bagi politik dan demokrasi dapat dibagi dalam empat kategori (van Dijk, 2000: 40), yaitu:

1. **Allocation**, menyangkut aspek-aspek: *computerized election campaigns*, *computerized election information*, *computerized civic service and information centers*
2. **Consultation**, menyangkut aspek-aspek: *mass public information system*, *advanced public information system (internet)*
3. **Registration**, menyangkut bidang: *registration system for government and public administration*, *computer-assisted citizens enquiries*, *electronic polls*, *electronic referenda*, *electronic elections*

4. **Conversation**, mencakup bidang: *bulletin board systems*, *discussion lists*, *electronic mail and teleconferencing*, *electronic town halls*, *group discussion support system*.

Platform Media Baru Interaktif

Struktur *platform* media baru menjadi faktor paling menentukan kualitas interaktif untuk komunikasi politik warga. Sebagian besar *platform* media baru masih berfungsi untuk mengekspresikan opini secara dialogis, kalau bukan personal. Masih sangat terbatas design media baru yang sungguh-sungguh menghidupkan interaktivitas secara merata. Artinya diperlukan usaha tambahan untuk menciptakan ruang interaktif sesuai dengan sistem design bahasa pemrograman komputer.

Twitter, *Facebook*, dan *blog/website* sebagai bentuk media baru paling tren menawarkan potensi untuk ruang interaktif tersebut. Dulu sempat ada sebuah web blog yang sengaja dirancang untuk diskusi politik yaitu Politikana.com, tetapi sudah tidak beroperasi lagi. Saat ini, diskusi yang menekankan unsur interaktif ini terlihat pada kolom komentar yang tersedia baik pada *website media*, *blog*, *Facebook*, *Twitter*, maupun *Youtube*. Sebagai gambaran berikut ditunjukkan satu contoh diskusi di salah satu web berita media nasional. Dalam diskusi terkait ricuh pemungutan suara di Hongkong karena banyak yang tidak dapat memberikan suara mereka, para *netizen* membahas dengan serius. Dari 284 orang yang terlibat dalam diskusi tersebut, terdapat 685 komentar hingga satu hari setelah kejadian tersebut. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ada upaya saling jawab antar para komentator tersebut yang memberi kualitas interaktif pada diskusi ini.

Ruang Publik Baru di Indonesia

Internet masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an ketika B. J. Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (1978-1998). Habibie sekaligus merupakan menteri pertama yang punya website di internet. Pada tahun 1986 Dewan Riset Nasional yang

dipimpin oleh Habibie merekomendasikan agar dilakukan pengembangan layanan sains dan teknologi informasi di tanah air yang kemudian mengkristal dengan terbentuknya jaringan informasi internet IPTEKnet pada tahun 1989 yang dikelola di bawah Badan Penilaian dan Penerapan Teknologi (Sen and Hill, 2007). Pada tahun 1998/99, warung internet (warnet) mulai bermunculan di dekat kampus UGM, UNY, dan UAJY Mrican di Yogyakarta.

Seiring dengan penetrasi internet dari dunia bisnis yang begitu gencar, dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi juga berlomba-lomba untuk *go online*. Dari fasilitas *research archive* di perpustakaan hingga fasilitas wireless zone sudah tidak asing lagi di dunia kampus saat ini. Maka tidak heran juga pengguna internet di Indonesia hingga kuartar pertama tahun 2010 mencapai 30 juta orang dengan tingkat penetrasi pada tingkat 12,5% (www.internet-worldstats.com), bahkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memprediksi tahun ini (2014) terdapat 107 juta pengguna internet di Indonesia. Artinya, ada tren peningkatan partisipasi masyarakat Indonesia di internet secara signifikan setiap tahunnya.

Media konvensional juga sudah melakukan digitalisasi. Institusi pendidikan, lembaga pemerintah, dunia bisnis, hingga *outlet boutique* kecil bisa punya ruang jualan

secara online. Konvergensi dan digitalisasi menjadikan masyarakat dapat lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan dan merespon informasi yang mereka butuhkan. Khusus media konvensional yang berorientasi pada berita selalu menyediakan ruang (*comment boards*) di mana komentar dan tanggapan bisa disampaikan. Komentar tersebut tidak ditujukan untuk redaksi, tetapi merupakan ekspresi politik yang kemudian dapat memicu tanggapan dari orang lain. Jadi, secara tidak langsung ditigalisasi media konvensional dapat mendorong diskusi politik secara *online*.

Pada skala yang lebih luas, komunitas blogger dan forum diskusi politik online yang punya website sendiri merupakan ruang diskusi politik (*political talk*) yang paling representatif. Beberapa bentuk ruang diskusi online yang ada seperti: www.kompasiana.com, www.forum.detik.com, dan www.kaskus.com, dan yang lainnya, termasuk yang dibuat dalam platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Inilah struktur ruang publik yang transformatif yang bisa diakses secara bebas oleh siapapun (publik) di mana pun. Ruang publik transformatif ini meruntuhkan struktur ruang publik lama yang cenderung membatasi tidak hanya partisipasi, tetapi juga informasi lewat proses *gatekeeping*.

Gambar 1: Diskusi di Website Berita

Sumber: Kompas.com (07 Juli 2014)





Struktur inilah yang berubah drastis pada media baru di banding media konvensional pendahulunya.

Transformasi yang digerakkan oleh media baru pada komunikasi politik terletak pada perubahan struktur komunikasi politik itu sendiri. Akibat yang paling signifikan dari perubahan struktur tersebut adalah posisi dan pengaruh aktor-aktor politik yang lebih setara (*equal*) baik dalam partisipasi maupun bobot diskursif yang dihadapkannya.

Transformasi Komunikasi Politik

Terdapat tiga dimensi penting ketika melakukan kajian tentang ruang-ruang komunikasi dalam konteks demokrasi, yaitu: dimensi struktural, representasional, dan interaksional (Dahlgren, 2005: 148).

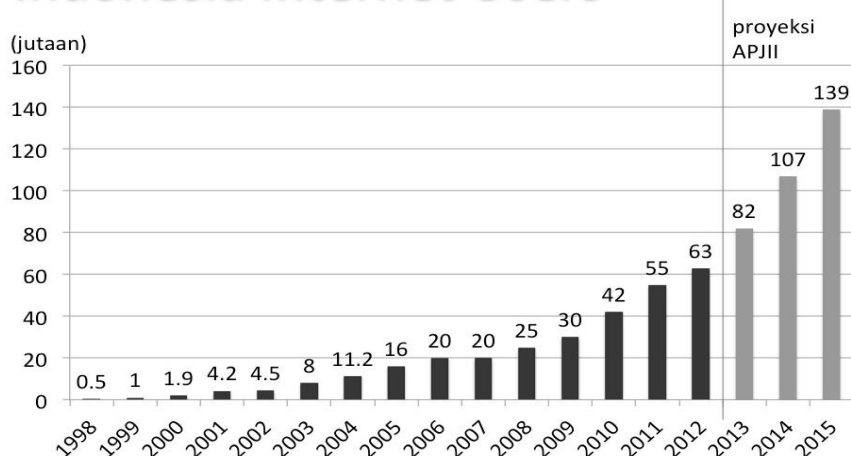
Ketiga dimensi tersebut sebenarnya saling terkait, namun dalam kesempatan ini khusus mengulas aspek struktural dari ruang publik itu sendiri dalam bentuk media baru.

Dimensi struktural mencakup sisi organisasi (media) seperti kepemilikan, kontrol, regulasi, serta aspek pengaturan yang menguatkan atau sebaliknya mengekang kebebasan berkomunikasi.

Struktur komunikasi politik merupakan salah satu sisi yang berubah secara signifikan berkat media baru ini. Komunikasi politik, seperti dikemukakan Denton & Woodward merupakan:

“Pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state rewards or punishes)” (dikutip dalam McNair, 3003: 3).

Indonesia Internet Users



Grafik 1: Tren Pengguna Internet di Indonesia

Sumber: <http://www.apjii.or.id/v2/read/page/halaman-data/9/statistik.html>

Penjelasan Denton & Woodward lebih menekankan komunikasi politik dalam tataran makro, yaitu pada tingkat struktur politik. Sementara McNair (2003: 4) melihat komunikasi politik lebih mikro. Dia membagi komunikasi politik ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. *All forms of communication undertaken by politicians and other political actors for the purpose of achieving specific objectives.*
2. *Communication addressed to these actors by non-politicians such as voters and newspaper columnists.*
3. *Communication about these actors and their activities, as contained in news reports, editorials, and other forms of media discussion of politics.*

Walaupun McNair melihat komunikasi politik lebih khusus dan kategorikal, namun pola komunikasi politik yang dia jelaskan masih bersandar pada tradisi media konvensional. Hal itu terlihat dari bentuk skema komunikasi politik yang dia usulkan (McNair, 2003: 6). Jika boleh diringkas, maka komunikasi politik McNair terdiri dari dua bagian: *pertama*, komunikasi politik dari aktor politik menggunakan media kepada masyarakat, dan *kedua*, komunikasi politik dari warga negara lewat media kepada para aktor politik, atau oleh media sendiri kepada aktor politik.

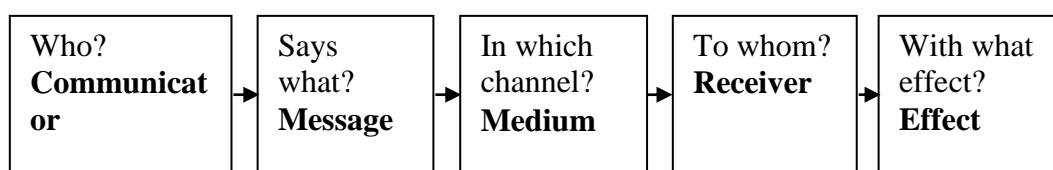
Sehingga jika dibandingkan dengan model komunikasi politik klasik dari Harold D. Laswell, maka nyaris tidak ada bedanya. Formula Laswell (McQuail & Windahl, 1993: 12) yang terdiri dari: “*Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?*” menegaskan bentuk komunikasi satu arah, dengan kata lain

minim interaksi. Sebaliknya, komunikasi politik lewat media baru bersifat multiarah dan prosesnya sangat interaktif. Sifat desentralisasi dan interaktivitas yang melekat dalam media baru menopang sifat komunikasi politik menjadi sangat horizontal dalam wujud jejaring. Sehingga tidak ada satu aktor yang menguasai secara dominan jalannya proses komunikasi.

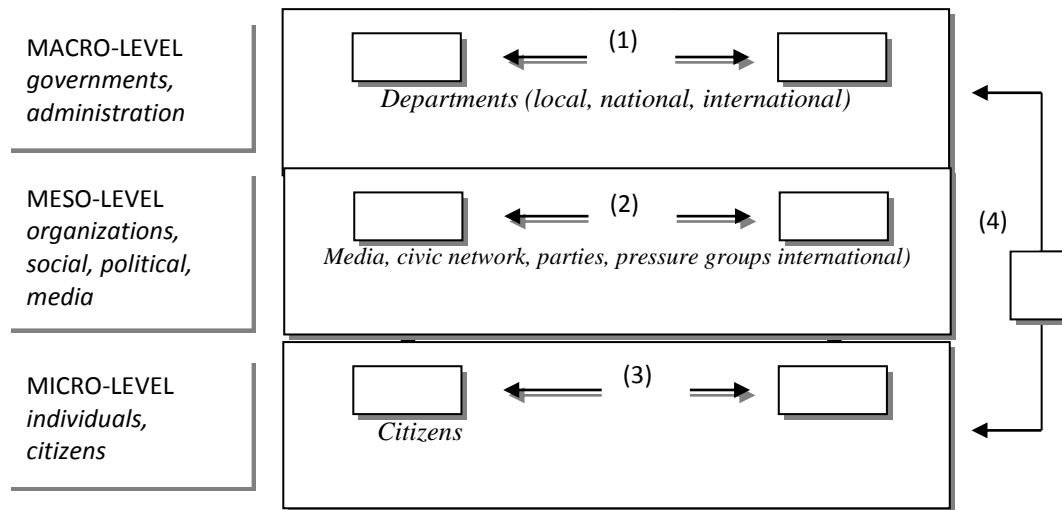
Objek kajian komunikasi politik dalam era media baru sangat terdesentralisasi. Komunikasi politik yang dilakukan oleh masyarakat baik secara vertikal, maupun horizontal menjadi fokus kajian dalam era konsolidasi demokrasi. Proses komunikasi politik menjadi datar dan menyebar. Hal ini sangat berbeda dengan konsep konvensional yang melihat komunikasi politik sebagai upaya untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih lewat iklan, kampanye, dan lain-lain. Dalam era media baru, kehadiran masyarakat makin kuat sebagai aktor politik. Masyarakat dapat langsung berkomunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan tanpa harus melalui perantara. Bentuk-bentuk komunikasi politik yang menyebar tersebut dapat digambarkan pada bagan 2.

Komunikasi politik tingkat makro terjadi pada tataran struktur politik yang melibatkan lembaga-lembaga politik secara formal. Komunikasi politik pada tingkat meso terjadi pada lembaga-lembaga di luar struktur politik seperti media, partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Sedangkan komunikasi politik pada tingkat mikro berlangsung di antara sesama anggota masyarakat sendiri. Komunikasi lintas tingkatan, misalnya antara mikro dengan makro (no. 4) menunjukkan hubungan antara warga negara dengan sistem politik, di mana internet dapat memberi kontribusi besar.

Bagan 1: Proses Komunikasi Lasswell
(Dikutip oleh: McQuail & Windahl, 1993, hal. 12)



Bagan 2: Tingkatan Komunikasi dalam Sistem Politik
(van Dijk & Hacker, 2000:217)



Komunikasi Politik Transformatif di Indonesia

Penggunaan media baru untuk komunikasi politik yang lebih tren saat ini adalah e-government, kampanye lewat internet, komunikasi politik online warga, serta relasi horizontal antara warga negara dengan warga negara lain baik dalam bentuk kelompok virtual maupun dalam konteks pendidikan politik antarwarga. Menjelang pemilu 2014 muncul sejumlah kelompok masyarakat terdidik yang berupaya untuk memperkuat kesadaran politik warga negara lewat diseminasi informasi politik secara online yang dalam media baru menjadikan para *netizens* sebagai target.

1. E-Government: Government to Citizen

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi, seperti wide area networks, internet, dan mobile computing, oleh lembaga-lembaga pemerintah yang mampu mentransformasi hubungan antara pemerintah dengan warga negara, bisnis, dan sesama elemen pemerintah lainnya (www.worldbank.org). *E-government* sering dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: *government to government* (G2G), *government to business*

(G2B), dan *government to citizen* (G2C) (Bonham, et. al., 2001).

Sisi transformatif dalam *e-government* adalah warga negara dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah tanpa harus dibatasi ruang dan waktu lewat website berbagai lembaga pemerintahan. Demikian juga halnya pemerintah lebih intens dan efisien dalam menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan oleh masyarakat dengan berbagai kecanggihan fasilitas media baru atau media sosial. Pelaksanaan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan dua puluh empat jam sehari.

Beberapa website pemerintah yang cukup lengkap dengan layanan kemasyarakatan adalah DKI Jakarta (www.jakarta.go.id), Bandung (http://bandung.go.id), Sumatra Barat (www.sumbarprov.go.id/), dan Riau (www.riau.go.id), dengan fasilitas mulai informasi mulai dari layanan komunikasi lewat email, download dokumen, agenda pejabat, staf, bahkan sampai pembuatan KTP serta pengurusan perizinan. Satu hal yang menarik perhatian adalah disediakan Kolom Aspirasi atau rubrik untuk menyampaikan aduan dan kritik dari masyarakat. Tren ini seolah membangkitkan

kembali spirit demokrasi langsung (*participatory democracy*) zaman Yunani kuno. Di samping itu, *e-government* dapat mewujudkan budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya (*accountable*). Wujud *e-government* ini berupa website pemerintahan di seluruh lini. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar.

2. Kampanye Politik Online: *Political Elite to Citizen*

Kampanye *online* ini bisa dilakukan secara perseorangan, bisa juga secara organisasional dari partai-partai politik. Kampanye online sangat marak dilakukan pada saat menjelang Pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal. Seiring dengan perkembangan aplikasi internet dalam politik mulai muncul tren pemilihan ketua organisasi atau partai politik menggunakan media online untuk mensosialisasikan pribadi kandidat dan program kerjanya. Dalam konteks Pemilu contoh yang sangat tepat adalah keberhasilan senator Barack Obama dalam pemilu presiden di Amerika Serikat yang menjadikannya sebagai Presiden AS yang baru. Dua tujuan utama yang dicapai dari media baru tersebut adalah penggalangan sumbangan dan mobilisasi sukarelawan politik.

Di Indonesia sendiri sudah mulai terlihat politisi dan partai politik menggunakan media sosial guna menyebarluaskan informasi politik kepada masyarakat atau untuk sekedar mempertahankan jaringan yang sudah terbangun, khususnya lewat platform Twitter. Beberapa contoh sebagai berikut: @jokowi_do2 (Joko Widodo), @iskan_dahlan (Dahlan Iskan), @aniesbaswedan (Anies Baswedan), @prabowo08 (Prabowo Subianto), @hattarajsa (Hatta Rajasa), dan @presidenSBY (Susilo Bambang Yudoyono). Sejumlah partai politik membuat website informatif, akun Facebook dan twitter. Sebagai contoh PDI-P ada di: id-id.facebook.com/DPP.PDI.Perjuangan; twitter.com/PDI_Perjuangan; dan website pdiperjuangan.org/?view=mosaic. Partai lainnya seperti Golkar: partaigolkar.or.id/; dan Partai NasDem: partainasdem.org serta

PKB: pkb.or.id/, dan lain-lain. Meskipun demikian partai politik belum maksimal dalam memanfaatkan kekuatan media baru ini, sebagaimana terlihat pada website partai yang tidak atraktif dan tidak interaktif.

Kampanye politik yang selama Pemilu 2014 terjadi justru lebih banyak dilakukan oleh masyarakat akar rumput sebagai simpatisan dan relawan terhadap kandidat dan partai politik tersebut. Contoh dari kampanye relawan Jokowi seperti <http://baranews.co/>, <https://id-id.facebook.com/JOKOWI4ID>, dan aplikasi Jokowi4Presiden di GooglePlay.

3. Media Aspirasi Rakyat: *Citizen to Elite*

Salah satu bentuk perubahan struktur pada komunikasi politik adalah pola dan peran warga negara sebagai aktor politik itu sendiri. Komunikasi politik lewat media konvensional lebih menempatkan warga sebagai target yang harus dipengaruhi, agar menguntungkan bagi elit yang berkepentingan. Warga bersikap sangat pasif. Bukannya hanya interaksi dengan elit politik, komunikasi antarwarga pun pada regim media lama ini cenderung langka.

Media baru membentuk struktur komunikasi yang memungkinkan warga negara sebagai aktor politik, lepas dari bersentuhan dengan negara atau tidak. Bentuk komunikasi politik warga masyarakat secara online dapat berupa bentuk-bentuk berikut (disarikan dari Gibson et al., (2005):

- (1) *discussing politics in a chat group*; (2) *joining an email discussion about politics*; (3) *sending an e-postcard from a political organization's website*; (4) *signing an online petition*; (5) *sending an email to a politician*; (6) *sending an email to local or national government*; (7) *sending an email to a political organization*; (8) *participating in an online question and answer session with a political official*.

Sayangnya masih ada kendala implementasi media baru untuk komunikasi politik masyarakat di Indonesia yaitu: *digital divide*. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan kebijakan informasi dan telekomunikasi yang berorientasi pada pemerataan akses teknologi sebagai bagian dari misi pembangunan nasional. Agar akses universal atas teknologi informasi tersebut berdaya guna, maka secara simultan diperlukan pendidikan tentang teknologi informasi (*new media literacy*), baik lewat jalur formal maupun informal. Bentuk aplikasi media ini antara lain: website berita yang punya kolom komentar oleh pembaca, megablog *kompasiana.com*, serta akun sejumlah kelompok maupun pribadi di Twitter dan Facebook yang sering memicu diskusi politik.

4. Pendidikan Politik: Citizen to Citizen

Pada Pemilu 2014, pemilih Indonesia mendapat sumber informasi politik secara transparan dan kritis, khususnya yang berkaitan dengan para calon legislatif yang jumlahnya mencapai 6000-an orang untuk DPR RI. Gerakan sosial ini diprakarsai oleh sejumlah kelompok yang peduli dengan perubahan politik pada lembaga legislatif yang selama ini dipandang sangat korup. Maka ada niat untuk membuka informasi sebanyak mungkin terkait dengan calon anggota DPR tersebut sehingga masyarakat tidak salah pilih. Berikut hasil observasi terhadap sejumlah gerakan pendidikan politik dari warga untuk warga ini.

Sejumlah gerakan *grassroot* ini diprakarsai oleh masyarakat yang sadar akan peran strategis media baru dalam kehidupan masyarakat secara khusus pada bidang politik. Sifat aksesibilitas media baru yang tanpa batas dengan karakter pemilih pemula yang adalah sadar teknologi, menjadi kekuatan tersendiri dalam upaya konsolidasi demokrasi elektoral di Indonesia.

Setidaknya ada tujuh bentuk aplikasi media baru pada komunikasi politik mikro secara horizontal antara warga dengan warga negara yang lainnya, yang juga dibentuk secara swadaya oleh warga negara. Komunikasi politik mikro yang mengubah struktur dan pola komunikasi politik ini akan dijelaskan secara ringkas berikut ini.

a. Vote Cerdas BDG (votecerdas.org)

VoteCerdas BDG adalah sebuah inisiatif warga Bandung untuk membantu sesama warga agar dapat melunasi tugas kewargaannya dengan baik dan penuh tanggungjawab. VoteCerdas BDG memberi penonjolan khusus menyangkut para calon legislatif DPRD Kota Bandung. Tampilan VOTECERDASBDG terlihat cukup menarik seperti pada gambar. Adapun data yang disediakan adalah foto, nama, data pribadi lengkap, dan rate transparansi tokoh.

Gambar 2: Tampilan Depan VOTECERDAS BDG



b. Orang Baik (orangbaik.org)

Aplikasi ini memuat biodata dan kemampuan para calon legislatif pada Pemilu 2014 dengan sistem skor. Data yang tersedia seperti foto, data diri, data politik, pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman, serta skor penilaian tokoh yang didasarkan pada kriteria.

Aspek menarik pada kelompok ini adalah adanya sistem penilaian yang dihitung berdasarkan beberapa faktor, yaitu: Tingkat Pendidikan (30%), Tingkat Universitas (20), Pengalaman Pekerjaan (15), Pengalaman Organisasi (15), Umur (15), dan Wawasan akan lingkungan (5). Sesuai dengan olah data yang mereka buat, terlihat bahwa skor tertinggi yang dicapai oleh calon legislatif adalah 70, dan terendah adalah 0 dengan jumlah yang sangat dominan.

c. Bersih 2014 (bersih2014.net)

Media komunikasi ini dibentuk oleh sejumlah LSM (Kontras, ICW, WALHI, PSHK, dan KPA), yang gelisah dengan pencalonan kader partai politik untuk ikut Pemilu 2014.

Sejumlah informasi menarik dan kritis disediakan oleh kelompok ini khususnya panduan memilih caleg bersih.

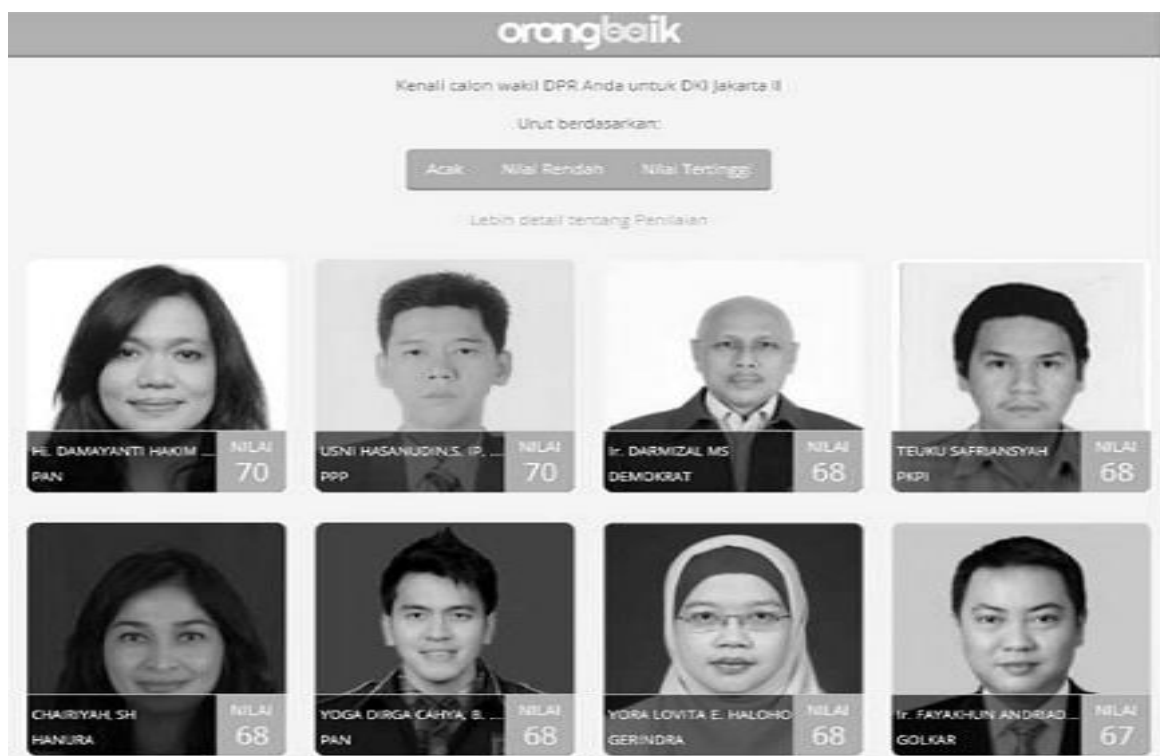
Daftar nama caleg yang ada pada website ini adalah nama-nama yang dianggap bersih dan kredibel khususnya dari sudut pandang hak asasi manusia.

Adapun data yang tersedia pada media ini adalah nama, nomor urut, dan CV yang terhubung ke website KPU.

d. Check Your Candidates (checkyourcandidates.org)

Sebuah media komunikasi politik untuk membantu masyarakat mengenali rekam jejak calon anggota legislatif dengan usia di bawah 40 tahun, sehingga pemilih muda mempunyai informasi yang cukup untuk menentukan pilihannya di bilik suara nantinya. Sejumlah data yang tersedia adalah: foto, nama, nomor urut, pendidikan pekerjaan, dan link berita terkait dengan tokoh tersebut, serta review/komentar pengunjung website terhadap tokoh yang ditampilkan.

Gambar 3: Tampilan Depan “Orang Baik”



e. **Mata Massa (matamassa.org)**

Kelompok ini menyediakan aplikasi pemantauan pemilihan umum legislatif dan presiden 2014 untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Aplikasi MataMassa dapat diunduh di telepon selular berbasis iOS, Android, maupun BlackBerry. Data: daerah, tokoh atau partai, dan pelanggarannya.

f. **Rumah Pemilu**

(rumahpemilu.org)

Media informasi dan komunikasi tentang pemilu. Media ini didedikasikan buat masyarakat luas, khususnya para pemangku kepentingan pemilu. Menjadi wahana interaksi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pemilu, dengan misi meningkatkan kualitas proses dan hasil pemilu

g. **Jari Ungu (jariungu.org)**

Situs ini dibangun sebuah tim, semuanya bukan politisi, bukan pengamat politik, bukan anggota atau simpatisan partai tertentu, tetapi rakyat biasa yang sejak pasca Pemilu Legislatif 2009 membutuhkan media komunikasi dengan para anggota parlemen yang sudah terpilih mewakili daerah kami. Data: foto, nama caleg, kapal, dan link berita tentang tokoh.

warga sendiri dengan satu kesamaan yaitu warga dapat mengenali calon wakilnya sebelum mereka memilih. Meskipun ada nilai yang ingin diperjuangkan dengan memilih dan menonjolkan informasi tertentu terkait dengan tokoh, namun keberpihakan yang terlembaga antara kelompok tersebut dengan para caleg tidak ada. Sehingga imparialitas penggiat sosialisasi politik online ini tetap terjamin.

PENUTUP

Media baru dapat memberi kontribusi yang besar bagi demokrasi. Kontribusi tersebut berupa terbentuknya ruang publik yang universal, bisa diakses oleh siapa saja. Sehingga masyarakat tidak mengalami hambatan untuk menyuarakan aspirasinya. Di sisi lain, media baru mengubah komunikasi politik yang selama ini cenderung *top-down*, menjadi *bottom up* dan *decentralized*. Pemerintah juga dapat makin membuka ruang bagi masyarakat lewat program *e-government* untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Perubahan ini pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik merupakan modal bagi terwujudnya demokrasi yang substantif bagi suatu bangsa.

Keseluruhan bentuk platform ruang pendidikan politik warga ini diciptakan oleh

The image shows a screenshot of the Bersih2014.net website. At the top, there is a banner with the text "SUARA KITA MENENTUKAN ARAH BANGSA" and "BERSIH2014.net". Below the banner, there is a navigation menu with links: Beranda, Berita, Kandidat, Sikap, Galeri, and Kontak. The main content area displays a list of candidates for the 2014 legislative election. The candidates are listed in a grid with their names and photos. The names are: Risa Bhinekanati, Aulia Prima Kumawati, Maria Wardhani, Nuraini Hilir, and Santo Dewatmoko. The website also features a sidebar with a "5 Panduan Memilih Caleg Bersih" section, which lists five guidelines for choosing clean candidates. The guidelines are: 1. Pilihlah caleg yang tidak pernah terlibat tindakan melanggar hukum. 2. Pilihlah orang yang benar-benar anda yakin pernah berbuat kebajikan untuk banyak orang alias berpengalaman membela kepentingan rakyat. 3. Pilihlah orang yang mempunyai cita-cita membuat kamu dan bangsa Indonesia bisa mendekatkan diri pada keberpihakan bagi orang miskin, mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu dan mendorong persahabatan bukan permusuhan. 4. Jangan percaya pada janji-janji, jangan terpengaruh pada poster, iklan di televisi atau bahkan jangan jual suara anda karena uang atau janji harta benda. 5. Jangan pernah takut untuk bertanya, mencari tahu siapa calon yang kamu akan pilih. Diskusikan dengan tetangga, teman, atau siapapun. Atau anda bisa hubungi KontraS di tlp 021-3926983 atau kunjungi kami di Website: www.Bersih2014.net, Twitter @Bersih2014, FB : Bersih2014.

Gambar 4: Tampilan Depan Bersih 2014

Indonesia sendiri masih menghadapi sejumlah kendala dalam hal implementasi media baru pada bidang politik. *Pertama*, persoalan kesenjangan teknologi khususnya antara desa dan kota. *Kedua*, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang potensi sekaligus konsekuensi dari media baru sendiri. Untuk itu diperlukan literasi media yang memadai. *Ketiga*, para elit politik belum mampu menggunakan media baru sebagai sarana kampanye politik dan komunikasi politik mereka karena rendahnya tingkat adopsi teknologi di tingkat elit politik.

Di sisi lain, bisa jadi mereka melihat bahwa cara tersebut belum efektif untuk menjangkau penduduk Indonesia yang sebagian besar masih tinggal di pedesaan. Tetapi walaupun demikian, mestinya pada elit politik bisa menggunakan media baru tersebut untuk penyebarluasan pemikiran politik mereka, mencari simpatisan, menampung aspirasi, bahkan mengumpulkan donasi secara online seperti yang diterapkan Barack Obama. Karena dengan memperhatikan data pemilih pada Pemilu tahun ini, 30% pemilih adalah pemilih muda di mana secara demografis mereka adalah orang-orang yang terdidik, kritis, aktif, serta sangat melek internet. Tren saat ini menunjukkan harapan yang positif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan hadirnya media baru dalam mengubah struktur dan pola komunikasi politik baik secara horizontal maupun secara vertikal.

REFERENSI

A. Buku

- Barber, Benjamin. (1990). *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Bohman, James. (1996). *Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.

- Flew, Terry. (2005). *New Media, An Introduction*, second edition. Australia: Oxford University Press.
- Habermas, Jurgen. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere, An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: Polity Press
- Hachten, William A. (1981). *The World News Prism: Changing Media, Clashing Ideologies*, 2nd edition. United State of America: Iowa State University Press.
- Held, David. (1995). *Democracy and the Global Order*. California: Standford University Press.
- McNair, Brian. (2003). *An Introduction to Political Communication*, Third edition. London & New York: Routledge.
- McQuail, Denis & Windahl, Sven. (1993). *Communication Models*, second edition. London & New York: Longman.
- Mughan, Anthony & Gunther, Richard. (2000). "The Media in Democratic and Nondemocratic Regimes: A Multilevel Perspective." Dalam Gunther, Richard & Mughan, Anthony (eds), *Democracy and the Media, A Comparative Perspective*. United Kingdom: Cambridge University Press, hal. 1-27.
- Pavlik, John V. (1996). *New Media Technology, Cultural and Commercial Perspectives*. USA: Allyn and Bacon.
- Siebert, Peterson, & Schramm. (1963). *Four Theories of the Press*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
- Sparks, Colin. (2001). "The Internet and the Global Public Sphere." Dalam Bennett, W. Lance & Entman, Robert M. (eds). *Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy*. United Kingdom: Cambridge University Press, hal. 75-95.
- Sen, Krishna and Hill, David. (2007). *The Internet in Indonesia's New*

- Democracy. USA and Canada: Routledge.
- van Dijk, Jan. (2000). "Models of Democracy and Concepts of Communication." Dalam van Dijk, Jan & Hacker, Kenneth L. (eds). *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication, hal. 30-53.
- van Dijk, Jan & Hacker, Kenneth L. (eds). (2000). *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication
- B. Jurnal**
- Baxter, Hugh. 1987. System and life-world in Habermas's Theory of Communicative Action. *Theory and Society*, Vol. 16, No. 1 (Jan.), pp. 39-86.
- Dahlberg, Lincoln. (2004). The Habermasian public sphere: A specification of the idealized conditions of democratic communication. *Studies in Social and Political Thought*, 10, 2-18.
- Dahlgren, Peter. (2005). "The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation." *Political Communication*, 22: 147-162.
- Habermas, Jurgen. (1974). "The Public Sphere: An Encyclopaedia Article." *New German Critique* 3, Autum, hal. 49-55.
- C. Website**
- Bonham, G. M. et. al. (2001). *The transformational potential of E-government: The role of political leadership*. Electronic Governance and Information Policy (Panel 9-1) at the 4th Pan European International Relations Conference of the European Consortium for Political Research. Retrieved February 27, 2003. Diakses dari: <http://www.maxwell.syr.edu/maspages/faculty/gmbonham/ecpr.htm>.
- Dryzek, John S. (2003). "Deliberative Democracy in Divided Societies: Alternatives to Agonism and Analgesia." Research School of Social Science, Australian National University. Diakses dari: http://socpol.anu.edu.au/pdf-files/Dryzek_divided.pdf
- Gibson, Rachel K. (2005). "Online Participation in the UK: Testing a 'Contextualised' Model of Internet Effects." *Political Studies Association*. Diakses dari: http://www.esri.salford.ac.uk/ESRCResearchproject/papers/gibson_et_al_2005_bjpir.pdf
- Mayfield, Anthony. (2008). What is social media? Diakses dari: <http://www.iCrossing.com/ebooks>.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/07/07/0107013/Pemungutan.Suara.di.Hongkong.Ricuh.Celetukan.Panitia.Memperparah.Situasi>
<http://my.barackobama.com/page/content/of/asplashflag/>
<http://www.facebook.com/barackobama>
<http://www.worldinternetstatistics.com>
<http://www.apjii.or.id>
<http://www.kompasiana.com>
<http://www.forum.detik.com>
<http://www.kaskus.com>
<http://www.worldbank.com>
<http://www.votecerdas.org/>
<http://bersih2014.net/>
<http://www.orangbaik.org/>
<http://www.matamassa.org/>
<http://jariungu.com/>
<http://www.rumahpemilu.org/>
<http://www.checkyourcandidates.org/>